



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Isu strategis adalah suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang, yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Untuk menunjang percepatan penyusunan program kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna, maka penyusunan rencana strategis perlu memperhatikan adanya isu-isu strategis baik yang berasal dari internal maupun eksternal, antara lain berupa informasi, kejadian dan dinamika kebutuhan masyarakat yang eksistensinya dapat mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai, antara lain :

1. Disahkannya Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang menegaskan bahwa pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara belum berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan serta promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga perlu mengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah





- dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 karena sudah tidak sesuai dengan penyelenggaraan kepegawaian;
2. Disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dilakukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang menegaskan adanya perubahan bahwa laporan keuangan disusun menggunakan SAP berbasis akrual yang semula berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan disusun menggunakan SAP berbasis kas menuju akrual ;
 4. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, yang menegaskan bahwa penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai bagian dari pembinaan PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan hukum dalam pembinaan PNS sehingga perlu dilakukan penilaian prestasi kinerja untuk mewujudkan pembinaan PNS berdasarkan system prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada system prestasi kerja ;





5. Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;

Memperhatikan beberapa kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat secara tidak langsung akan mempengaruhi capaian kinerja BPKAD, karena penyusunan dan penerbitan kebijakan tersebut seringkali tidak melibatkan Pemerintah Daerah dan dilakukan sosialisasi secara maksimal kepada *stakeholder* serta tidak dibarengi pula petunjuk teknis pelaksanaannya, sehingga pada tataran pelaksanaannya sulit untuk diimplementasikan secara optimal sesuai kondisi, karakter, dinamika dan kebutuhan di daerah.

Selanjutnya untuk menunjukkan prioritas dalam jalan menuju perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan kedepan, kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWACITA terdiri dari:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.





4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Untuk mendukung sembilan agenda prioritas nasional tersebut khususnya agenda point 2 dan 3, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai yaitu: a) perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b) pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan umum dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset; c) pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset; dan d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Banggai dalam pengelolaan keuangan dan Aset Daerah juga mendukung agenda prioritas tersebut dengan pengalokasian dana desa sesuai ketentuan peraturan yang ada.

Demikian juga dalam RPJMN 2015-2019 buku II terdapat kebijakan nasional yang perlu dicermati yang ada kaitanya dengan tugas pokok dan fungsi antara lain sebagai berikut:





1. Review dan perubahan UU No.28/2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah untuk dapat membebaskan BPHTB pada pendaftaran tanah pertama, hal ini akan berpengaruh terhadap pendapatan daerah;
2. Mengalokasikan anggaran untuk pembentukan institusi/lembaga bank tanah, meskipun ini merupakan kebijakan yang akan dilaksanakan Pemerintah Pusat tidak menutup kemungkinan akan diberikan kebijakan yang sama bila Pemerintah Daerah dapat melaksanakan dengan baik untuk kepentingan Pemerintah Daerah sendiri.
3. Mengalokasikan anggaran pembelian bidang-bidang tanah pada kawasan yang diprioritaskan pembangunannya. Ini sangat penting sebagai langkah menata tataruang wilayah yang memperhatikan kajian Lingkungan Hidup Strategis.
4. Meningkatnya implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah. Yang merupakan kewajiban standar dalam pelayanan publik.
5. Terwujudnya sebagian besar pelayanan publik yang diselenggarakan dengan berbasis teknologi informasi baik pelayanan administratif maupun non administratif. Diera teknologi tinggi, hal ini merupakan keharusan untuk tercipta efesiensi dan akurasi yang tinggi.
6. Meningkatnya Kemampuan Fiskal Daerah, yang merupakan tuntutan untuk meningkatkan laju pertumbuhan dan kemampuan pelayanan kepada masyarakat.
7. Meningkatnya Kualitas Belanja dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah, hal ini sangat relevan dengan agenda nasional dan visi misi Pemerintah Daerah.
8. Penguatan tranparansi dan akuntabilitas kebijakan dan pengelolaan keuangan Daerah; hal ini akan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintah yang bersih dan berwibawa sesuai misi pemerintah daerah.

Identifikasi isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi





diperlukan sebagai upaya inventarisir permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi SKPD guna dicarikan alternatif pemecahan masalah melalui keputusan pemangku kepentingan maupun melalui program dan kegiatan,

Dalam menganalisis isu strategis tersebut, hal hal yang dibahas antara lain : 1) Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD; 2) Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih; 3) Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota ; 4) Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan 5) Penentuan Isu-isu Strategis.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPKAD

Identifikasi dan Analisis Kondisi Internal.

1. Identifikasi dan Analisis Kekuatan.

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) maka BPKAD sangat berperan penting dalam pengelolaan keuangan daerah mulai dari proses anggaran hingga pertanggungjawaban APBD, mulai dari prose perencanaan aset hingga pelaporannya, namun peran penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sumberdaya yang baik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut. Faktor-faktor kunci keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi secara efektif dan efisien.





Untuk mencapai hasil yang konsisten dengan visi dan misi yang telah ditetapkan serta permasalahan utama yang telah teridentifikasi, maka diperlukan suatu strategi organisasi yang menjelaskan tentang pemikiran konseptual, analitis, realistis dan komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk mencapai atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Uraian tentang faktor-faktor kunci keberhasilan ini dimulai dengan melakukan identifikasi terhadap permasalahan utama yang ada. Studi organisasi serta mencari solusinya dengan cara melaksanakan strategi untuk menanggulangnya. Strategi didefinisikan sebagai suatu proses dimana misi dan tujuan dasar organisasi disusun dengan menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan.

2. Identifikasi dan Analisis Kelemahan.

Secara umum sarana dan prasarana yang tersedia pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sudah cukup memadai hanya saja dalam usaha pengembangan Software dan Hardware tentang pengelolaan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah, terutama jaringan komputer di BPKAD belum terkoneksi dengan SKPD-SKPD, namun secara bertahap akan diupayakan untuk dapat direalisasikan. Dalam hal pengelolaan aset daerah lemahnya pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan barang milik daerah Rendahnya pemahaman terhadap petunjuk teknis dan pelaksanaan serta rendahnya koordinasi dan kerjasama.





Identifikasi dan Analisis Kondisi Eksternal.

1. Identifikasi dan Analisis peluang.

Berdasarkan pengalaman yang ada selama ini, bahwa kinerja yang dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tidak terlepas dari kerjasama semua pihak, baik peran serta masyarakat/DPRD ataupun Instansi pemerintah lainnya melalui pola koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi.

2. Identifikasi dan Analisis Ancaman.

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), maka peran BPKAD sangat penting dalam melakukan pembinaan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan dibidang keuangan lingkup Pemerintahan Daerah. Namun peran penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung sumberdaya yang baik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Sejalan dengan itu ada beberapa hal yang menjadi hambatan dan kendala yang dihadapi, antara lain :

- a. Sebaran tenaga yang memiliki kemampuan profesional dan mempunyai kompetensi belum merata dalam berbagai bidang tugas.
- b. Pengembangan Hardware dan Software tentang sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah, kualitas jaringan komputer yang terkoneksi dengan SKPD Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai masih perlu adanya peningkatan
- c. Masih kurang tersedianya sarana dan prasarana pendukung lainnya yang menunjang kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).





Adapun solusi dan upaya pemecahan masalah tersebut antara lain :

1. Peningkatan kapasitas, kompetensi dan SDM bagi para pejabat dan staf melalui pendidikan dan pelatihan teknis sesuai dengan tupoksi masing-masing, hal ini direncanakan dengan melaksanakan pembinaan secara berkala dan intensif bagi Aparatur, untuk itu akan segera dilakukan pembentukan UPTB Aset dan UPTB Keuangan yang salah satu fokusnya melakukan pembinaan.
2. Pengembangan Hardware dan Software tentang sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah secara bertahap akan diupayakan dilakukan penyempurnaan.
3. Peningkatan sistem informasi tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah serta melatih tenaga Apayang dapat mengakses sistem informasi keuangan dan aset daerah melalui teknologi internet dalam upaya mengembangkan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Tabel III.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kabupaten Banggai

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Opini Pengelolaan Keuangan	WTP	Hasil audit BPK	Petunjuk teknis pertanggungjawaban keuangan; selektifitas pencairan	Kerja sama SKPD dan pihak ketiga	Kemampuan teknis Tenaga verifikasi belum merata





			dana		
SDM	Kondisi SDM kurang proporsional per bidang dan per seksi dan belum terlatih	Kebutuhan per seksi minimal 3 orang staf	Uraian tugas per seksi dan PNS	Kekurangan personil (mutasi Pegawai bukan kewenangan)	Pelayanan masih lambat
Aplikasi	SIMDA	Output aplikasi yang sesuai dengan peraturan	Menjalin kerjasama untuk memiliki Aplikasi yang handal	Dukungan Pimpinan dan dukungan politis; kepatuhan para bendahara pengeluaran dan bendahara barang SKPD	Permasalahan proses penganggaran; aplikasi pengelolaan aset belum maksimal
Peraturan	Peraturan diperoleh dengan Surat dari Pemerintah, Kementrian, Propinsi dan melalui Internet	Upaya untuk menjalankan peraturan/ketentuan yang ada dalam menjalankan tupoksi	Meratifikasi sejauh tidak melanggar ketentuan	Perbedaan persepsi antar lembaga	Pelayanan terhambat

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.





Suatu isu strategis bagi SKPD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD di masa lima tahun mendatang.

Tabel III.2
Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persaingan bebas	Peraturan berubah dengan cepat	Informasi semakin terbuka dan cepat	Peran BPKAD Yang Strategis
2	Pasar Global	Kebebasan Pers	Masyarakat semakin kritis	Kepercayaan Pimpinan
3		HAM dan Kesetaraan gender	Kontribusi gas sebagai Pendapatan Bagi Hasil	Mudah Berkoordinasi Dengan Provinsi Dan Pusat
4		Informasi semakin terbuka dan cepat		Perbedaan Persepsi Dalam Membaca Peraturan Dengan Pemeriksa Fungsional
		Nawacita		Masyarakat Semakin Kritis
				SDM

Dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi diatas diperoleh dari informasi antara lain adalah: (1) Hasil analisis gambaran pelayanan SKPD (Bab. II); (2) Hasil analisis Renstra K/L dan Renstra-SKPD provinsi/kabupaten/kota; (3) Hasil telaahan RTRW; dan (4) Hasil analisis KLHS pada bagian berikut :





3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Adapun Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih sebagai berikut:

VISI :

**Mewujudkan Kabupaten Banggai sebagai Pusat
Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan Kemaritiman
berbasis Kearifan Lokal dan Budaya.**

Melihat Visi yang diusung Kepala Daerah terpilih bahwa penataan pembangunan dititik beratkan pada peningkatan ekonomi, pertanian dan kemaritiman yang berbasis kearifan local dan budaya.

Rasanya tidak berlebihan visi yang dikemukakan oleh pemimpin terpilih mengingat potensi sumber daya alam Kabupaten Banggai yang cukup besar dapat mewujudkan apa yang menjadi prioritas sasaran pembangunan jangka menengah dan jangka panjang.

Dalam rangka mewujudkan visi yang ada, maka harus sejalan dengan misi. Sehingga tercipta program pembangunan yang terarah, sistematis dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Kabupaten Banggai.





6 MISI KAB. BANGGAI :

1. Menciptakan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih menuju Pemerintahan yang Berwibawa.
2. Mengembangkan Pertanian melalui Pemanfaatan Teknologi.
3. Mengembangkan Sektor Kemaritiman Berbasis Potensi Wilayah
4. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktural Berkualitas dan Merata
5. Mewujudkan Pengembangan Nilai-Nilai Agama, Kearifan Lokal dan Budaya.
6. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Daya Saing Daerah.

Mengacu pada visi dan misi yang diusung oleh pemimpin terpilih yaitu bahwa pemimpin harus dapat :

1. Menciptakan Pemerintahan Yang Baik dan bersih serta Akuntabel menuju Pemerintahan yang Berwibawa.

Mengubah kondisi Kabupaten Banggai dari keadaan ekonomi yang stagnasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang dinamis sehingga merangsang aktivitas ekonomi masyarakat dilapisan terbawah.

2. Peningkatan Produktifitas Pertanian melalui Pemanfaatan Teknologi Pertanian.

Mewujudkan Kabupaten Banggai sebagai produsen dan penyuplai tertinggi bahan pangan tidak saja secara domestic di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, demikian pula ke Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Utara.





3. Mengembangkan Sektor Kemaritiman.

Mengembangkan sector kelautan yang selama ini di Kabupaten Banggai masih bersifat fisik semata, belum mencakup pengembangan kemaritiman dalam arti luas yaitu pengembangan sector pelayaran dan perdagangan yang memungkinkan mobilitas barang dan jasa semakin meningkat.

4. Penyediaan dan Penyempurnaan Infrastruktural.

Infrastruktur adalah seluruh fasilitas baik fisik dan non fisik yang sengaja dibangun oleh pemerintah untuk mendukung terlaksananya kegiatan masyarakat. Pembangunan infrastruktur merupakan hal penting yang pengadaannya harus disegerakan karena berhubungan dengan kebutuhan dasar masyarakat sehari – hari dalam lingkup social dan ekonomi.

5. Pengembangan Nilai-Nilai Agama, Kearifan Lokal dan Budaya.

Menjadikan kearifan local dan budaya sebagai pijakan dalam pembangunan dimana nilai cultural dan agama tak terpisahkan agar tercipta keselarasan dan keharmonisan dengan lingkungan masyarakat Kabupaten Banggai

6. Pengembangan SDM.

Membangun Kabupaten Banggai sebagai pusat pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam.

Bila Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dapat dirumuskan/disusun sebagai berikut:





Tabel III.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Mewujudkan Kabupaten Banggai sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan Kemaritiman melalui Basis Kearifan Lokal dan Budaya.				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 1: Menciptakan Pemerintahan Yang Baik dan bersih serta Akuntabel menuju Pemerintahan yang Berwibawa.	Pelayanan belum prima	SDM belum cukup secara kuantitas dan kualitas (kemampuan teknis belum merata); Pemanfaatan sarana dan prasarana belum optimal tapi tidak diikuti bimtek, pelatihan dsb.	Tupoksi yang jelas strategis
	Misi 6 Pengembangan SDM.			

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/ Kota

Telaahan renstra K/L dan RPJM Kabupaten sebagaimana tabel-tabel dibawah ini :

Tabel III.4
Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	a. Sasaran Strategis dalam Tema Pendapatan Negara adalah: 1. Tingkat pendapatan yang optimal 2. Tingkat kepercayaan <i>stakeholders</i> yang tinggi dan citra yang meningkat yang didukung oleh tingkat pelayanan yang handal 3. Tingkat kepatuhan wajib pajak, kepabeanan, dan cukai yang tinggi	Pendapatan negara melalui pajak yang dipungut daerah sejauh ini belum optimal, ditandai dengan masih terdapatnya tunggakan wajib pajak, ini menunjukkan kepatuhan wajib pajak belum menggemblakan.	Informasi penyalahgunaan pajak oleh beberapa oknum di media memberi andil terhadap ketidakpatuhan wajib pajak.	Pajak merupakan salah satu unsur penting sumber pendanaan pembangunan.





No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p>b. Sasaran Strategis dalam Tema Belanja Negara :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alokasi belanja negara yang tepat sasaran, tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel 2. Tata kelola yang tertib transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan belanja negara. 3. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah; 4. Terciptanya tata kelola yang tertib sesuai peraturan perundang-undangan, transparan, kredibel, akuntabel, dan profesional dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Belanja daerah dinilai cukup efisien ditandai proporsi silpa oleh efisiensi belanja cukup besar. 2) Belanja daerah cukup tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan ditandai dengan penilaian kementerian keuangan memasukkan Banggai sebagai prioritas II dengan katagori KFD rendah, namun IPM-nya tinggi. Kelompok daerah ini dapat dikatakan termasuk daerah yang berkinerja baik, 	<p>Belanja daerah masih didominasi belanja tidak langsung untuk aparatur</p>	<p>Komitmen yang terus berupaya memperbaiki belanja dari tahun ke tahun</p>
	<p>c. Sasaran Strategis dalam Tema Pembiayaan APBN adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhinya pembiayaan APBN melalui utang secara tepat waktu, cukup, dan efisien. 2. Terciptanya kepercayaan para pemangku kepentingan (investor, kreditor, dan pelaku pasar lainnya) terhadap pengelolaan utang yang transparan, akuntabel, dan kredibel. 3. Terciptanya struktur portofolio utang yang optimal. 4. Terciptanya pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pembiayaan daerah tidak bersumber dari utang 	<p>Belum ada yang dapat meyakinkan bahwa pembiayaan yang bersumber dari utang memberikan manfaat yang lebih tinggi dibandingkan resiko yang harus ditanggung</p>	<p>Pemerintah daerah lebih bersifat difensif dalam mensiasati kebutuhan pembiayaan</p>
	<p>d. Sasaran Strategis dalam Tema Perbendaharaan Negara adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Efisiensi dan akurasi pelaksanaan belanja negara. 2. Optimalisasi pengelolaan kas. 3. Optimalisasi tingkat pengembalian dana di bidang investasi dan pembiayaan lainnya. 4. Peningkatan pelayanan masyarakat melalui penyempurnaan pengelolaan BLU. 5. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. 	<p>Telah terjadi efisiensi disatu sisi dibarengi dengan pemenuhan kebutuhan infrastruktur untuk antisipasi kebutuhan yang akan datang</p>	<p>Masih kecilnya sumber dana yang bersifat fleksibel seperti PAD, DBH, dan DAU</p>	<p>Pemerintah daerah menjadi cukup berhati-hati dalam pembelanjaan daerah</p>





No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	6. Terciptanya sistem perbendaharaan negara yang modern, handal dan terpadu.			
	e. Sasaran Strategis dalam Tema Kekayaan Negara adalah: 1. Terlaksananya perencanaan kebutuhan barang milik negara yang optimal 2. Terlaksananya penatausahaan kekayaan negara yang handal dan akuntabel 3. Terwujudnya pemanfaatan BMN berdasarkan prinsip <i>the highest and best use</i> 4. Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara 5. Terwujudnya database nilai kekayaan negara yang kredibel	Daerah terus berupaya menginventarisir dan melegalkan kepemilikan kekayaan daerah; Mengoptimalkan penggunaan aset yang idle; Mengupayakan pemenuhan kebutuhan barang.	Masih rendahnya koordinasi; Kurangnya tenaga pengelola aset.	Peluang untuk menciptakan tata kelola barang daerah yang akuntabel dan tertib
	f. Sasaran Strategis dalam Tema Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank adalah: 1. Terwujudnya regulator bidang pasar modal dan lembaga keuangan yang amanah dan profesional. 2. Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber pendanaan yang mudah diakses, efisien dan kompetitif. 3. Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sarana investasi yang menarik dan kondusif dan sarana pengelolaan risiko yang handal. 4. Terwujudnya industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang stabil, <i>resilience</i> dan <i>liquid</i> . 5. Tersedianya kerangka regulasi yang menjamin adanya kepastian hukum, keadilan dan keterbukaan (<i>fairness and transparency</i>). 6. Tersedianya infrastruktur pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang kredibel, dapat diandalkan dan berstandar internasional.	-Tumbuh dan berkembangnya LKBB dalam bentuk Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Syariah BMT dan LKM antara lain dengan penyertaan modal pemerintah	1. Koperasi Simpan Pinjam, koperasi Syariah BMT dengan manajemen yang baik masih sangat terbatas. 2. Belum terbentuknya LKM	1. Sangat dibutuhkan oleh UKM 2. Sebagai penunjang program penanggulangan kemiskinan





No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	g. Sasaran Strategis Pembelajaran dan Pertumbuhan dalam menunjang pencapaian tujuan strategis 6 tema pokok adalah: 1. Terwujudnya SDM yang berintegritas dan berkompentensi tinggi; 2. Terwujudnya organisasi yang handal dan modern; 3. Terwujudnya <i>good governance</i> ; 4. Terwujudnya dan termanfaatkannya TIK yang terintegrasi; 5. Tercapainya akuntabilitas laporan keuangan;	1) Komitmen SKPD untuk mewujudnya SDM yang berintegritas dan berkompentensi tinggi; 2) Dalam upaya menciptakan Terwujudnya organisasi yang handal dan modern; 3) Dalam proses Terwujudnya dan termanfaatkannya TIK yang terintegrasi; 4) Tercapainya akuntabilitas laporan keuangan;	Perbedaan persepsi dalam proses; Dukungan dana masih minim	Komitmen yang tinggi secara bersama-sama mewujudkan <i>good governance</i> ;

Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang ada hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi SKPD DPPKA secara umum tidak erat hubungannya, karena fungsi dilaksanakan oleh SKPD lainnya yang harus memperhatikan Lingkungan Hidup Strategis dalam rangka memperhatikan daya dukung alam, keanekaragaman hayati dan lain-lain

Tabel III.5
Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/kota terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota	Sasaran pada Renstra SKPD Provinsi	Sasaran pada Renstra K/L
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Dana, Dokumen, Laporan	Terciptanya efisiensi dan Efektifitas perencanaan dan pelaksanaan Sistim Administrasi Pengelolaan		a. Sasaran Strategis dalam Tema Pendapatan Negara adalah: 1. Tingkat pendapatan yang optimal 2. Tingkat kepercayaan <i>stakeholders</i> yang tinggi dan citra yang meningkat yang didukung oleh tingkat pelayanan yang handal 3. Tingkat kepatuhan wajib pajak, kepabeanaan, dan cukai yang tinggi





		Keuangan Daerah (94,92%)		
2	Dana, Sarana Dan Prasarana, Produk Aturan, Diklat Tehnis	Terciptanya Kualitas Sumber Daya Aparatur Dalam Pelaksanaan Sistim Pengelolaan Keuangan Daerah (99,57%)		b. Sasaran Strategis dalam Tema Belanja Negara : 1. Alokasi belanja negara yang tepat sasaran, tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel 2. Tata kelola yang tertib transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan belanja negara. 3. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah; 4. Terciptanya tata kelola yang tertib sesuai peraturan perundang-undangan, transparan, kredibel, akuntabel, dan profesional dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
3	Pendataan Dan Penagihan Obyek Baru PAD	Terwujudnya Intensifikasi Dan Ektensifikasi Sumber – sumber Pendapatan Daerah (97,45%)		c. Sasaran Strategis dalam Tema Pembiayaan APBN adalah: 1. Terpenuhinya pembiayaan APBN melalui utang secara tepat waktu, cukup, dan efisien. 2. Terciptanya kepercayaan para pemangku kepentingan (investor, kreditor, dan pelaku pasar lainnya) terhadap pengelolaan utang yang transparan, akuntabel, dan kredibel. 3. Terciptanya struktur portofolio utang yang optimal. 4. Terciptanya pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid.
	Dana, Sarana, Dan Prasarana	Terwujudnya Pengelolaan Aset Daerah Yang Tertib (98,55%)		d. Sasaran Strategis dalam Tema Perbendaharaan Negara adalah: 1. Efisiensi dan akurasi pelaksanaan belanja negara. 2. Optimalisasi pengelolaan kas. 3. Optimalisasi tingkat pengembalian dana di bidang investasi dan pembiayaan lainnya. 4. Peningkatan pelayanan masyarakat melalui penyempurnaan pengelolaan BLU. 5. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. 6. Terciptanya sistem perbendaharaan negara yang modern, handal dan terpadu.
	Laporan, Pengendalian PBB Perda, Diklat Tehnis PAD/PBB	Terciptanya Sistim dan Mekanisme pengelolaan Pendapatan Daerah (96,43%)		e. Sasaran Strategis dalam Tema Kekayaan Negara adalah: 1. Terlaksananya perencanaan kebutuhan barang milik negara yang optimal 2. Terlaksananya penatausahaan kekayaan negara yang handal dan akuntabel 3. Terwujudnya pemanfaatan BMN berdasarkan prinsip <i>the highest and best use</i> 4. Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara 5. Terwujudnya database nilai kekayaan negara yang kredibel
	Laporan, SD Aparatur, Sistim Pelaporan,	Terwujudnya Sistim Pelaporan Yang Akurat Dan Tepat Waktu		f. Sasaran Strategis dalam Tema Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank adalah: 1. Terwujudnya regulator bidang pasar modal dan lembaga keuangan yang amanah dan





Perda.	(98,50%)		<p>profesional.</p> <p>2. Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber pendanaan yang mudah diakses, efisien dan kompetitif.</p> <p>3. Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sarana investasi yang menarik dan kondusif dan sarana pengelolaan risiko yang handal.</p> <p>4. Terwujudnya industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang stabil, <i>resilience</i> dan <i>liquid</i>.</p> <p>5. Tersedianya kerangka regulasi yang menjamin adanya kepastian hukum, keadilan dan keterbukaan (<i>fairness and transparency</i>).</p> <p>6. Tersedianya infrastruktur pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang kredibel, dapat diandalkan dan berstandar internasional.</p>
Dana, Standar satuan Harga, Sarana Prasarana.	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Penunjang Yang memadai (92,38%)		<p>g. Sasaran Strategis Pembelajaran dan Pertumbuhan dalam menunjang pencapaian tujuan strategis</p> <p>6 tema pokok adalah:</p> <p>1. Terwujudnya SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi;</p> <p>2. Terwujudnya organisasi yang handal dan modern;</p> <p>3. Terwujudnya <i>good governance</i>;</p> <p>4. Terwujudnya dan termanfaatkannya TIK yang terintegrasi;</p> <p>5. Tercapainya akuntabilitas laporan keuangan;</p>

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tabel III.6
Hasil Telaah Struktur Ruang Wilayah
Kabupaten Banggai

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Dibentuk pola pusat pelayanan, sarana transportasi,	Wilayah utama sebagai cluster kegiatan perekonomian, sedangkan	Kawasan lindung, kawasan budidaya, Kawasan	Penyiapan anggaran untuk Terbukanya jalan yang menghubungkan	Mendukung semua program yang memberikan manfaat kepada





No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	dan kegiatan berfungsi primer.	Wilayah Penunjang sebagai pemberi dukungan dan penunjang perkembangan ekonomi wilayah.	Perdesaan, Perkotaan dan tertentu.	antar wilayah.	masyarakat
2	Pembentukan tersebut persatuan wilayah	Wilayah utama meliputi Luwuk, Luwuk Timur, Kintom, Batui, Toili dan Toili Barat; Wilayah Penunjang meliputi Bunta dan Pagimana, Bualemo, Balantak, Lamala dan Masama	Pembukaan sarana transportasi jalan sebagai penghubung perekonomian.	Penyediaan budget untuk pembukan jalan-jalan kantong produksi dll,	Mendukung agar perekonomian daerah berkembang

Tabel III.7
Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Banggai

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Wilayah Pengembangan Selatan	Sebagai wilayah utama	Pemenuhan Infrastruktur untuk terciptanya Pusat Kegiatan Wilayah	Penyediaan anggaran	Mendukung semua program
2	Wilayah Pengembangan Utara	Sebagai wilayah penunjang	Pemenuhan Infrastruktur untuk terciptanya Pusat Kegiatan Sub Wilayah dan Kegiatan Lokal	Penyediaan anggaran	Mendukung semua program
3	Wilayah Pengembangan Timur	Sebagai wilayah penunjang	Pemenuhan Infrastruktur untuk terciptanya Pusat Kegiatan Sub Wilayah dan Kegiatan Lokal	Penyediaan anggaran	Mendukung semua program





Tabel III.8
Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS
Kabupaten Banggai
SKPD Badan Pengelolaan

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan SKPD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Masih Memadai	Penyediaan anggaran	Pada SKPD Lainnya (BAPPEDA, BPLH, Dinhut, Dinbun, Dintan, Disciktar, Disbimair dll)
2.	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup	Pencemaran Lingkungan	Penyediaan anggaran	Pada SKPD Lainnya (BAPPEDA, BPLH, Dinhut, Dinbun, Dintan, Disciktar, Disbimair dll)
3.	Kinerja layanan/jasa ekosistem	Perlu ditingkatkan	Penyediaan anggaran	Pada SKPD Lainnya (BAPPEDA, BPLH, Dinhut, Dinbun, Dintan, Disciktar, Disbimair dll)
4.	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	Perlu ditingkatkan	Penyediaan anggaran	Pada SKPD Lainnya (BAPPEDA, BPLH, Dinhut, Dinbun, Dintan, Disciktar, Disbimair, Distamben dll)
5.	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Harus mengacu ketentuan yang berlaku	Penyediaan anggaran	Pada SKPD Lainnya (BAPPEDA, BPLH, Dinhut,





No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan SKPD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				Dinbun, Dintan, Disciktar, Disbimair dll)
6.	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	Belum ada masalah	Penyediaan anggaran	Pada SKPD Lainnya (BAPPEDA, BPLH, Dinhut, Dinbun, Dintan, Disciktar, Disbimair dll)

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Bahwa sebagai upaya mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah, maka diperlukan suatu media yang dapat menjembatani kedua struktur perencanaan pembangunan tersebut dan menjadi wadah untuk menampung kegiatan strategis dan prioritas dalam struktur anggaran sehingga terdapat keterkaitan dan sinergitas yang dapat disandingkan keselarasannya untuk mewujudkan pembangunan nasional yang berkesimbangan. Dalam upaya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran telah dilakukan beberapa langkah penyempurnaan pada proses penyusunan perencanaan baik ditingkat pusat, Provinsi maupun Kabupaten, dan salah satunya dengan menyusun isu-isu strategis daerah beserta kegiatannya.

Isu-isu strategis/program prioritas daerah adalah, sasaran strategis pemerintah daerah yang dianggap cukup signifikan dan relevan untuk mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan





daerah dalam jangka waktu tertentu yang terkait dengan perencanaan induk RPJMD dengan spesifikasi, antara lain :

- a. Merupakan bagian dari misi prioritas pembangunan daerah ;
- b. Mempunyai keterkaitan dengan isu strategis nasional ;
- c. Memiliki daya ungkit dengan pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar ;
- d. Merupakan kewenangan daerah secara keseluruhan atau sebagian ;
- e. Memiliki lokasi dan sasaran yang jelas dan terukur.

Mekanisme pelaksanaan isu strategis daerah diawali dengan melakukan kompilasi isu atau program yang menjadi prioritas pembangunan daerah yang tercantum dalam dokumen perencanaan dan kebijakan untuk kemudian diuji dengan kriteria dan pembobotan skala prioritas penyusunan dan penetapan isu strategis daerah oleh pemerintah daerah pada masa pra MUSRENBANG, pemetaan kegiatan prioritas ke dalam satu program strategis daerah dan pembahasan dalam MUSRENBANG melalui BAPPENAS.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Banggai, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pengelolaan Keuangan Dan Aset yang terintegrasi dengan perencanaan dan penganggaran di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2021 melalui penyusunan isu-isu strategis/program prioritas.

Pengertian isu strategis/program prioritas adalah sasaran strategis SKPD yang relevan untuk mendukung pencapaian visi





dan misi SKPD dalam jangka waktu tertentu dengan tetap mengacu kepada RPJMD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan prakiraan kapasitas perencanaan yang akan datang. Spesifikasi isu strategis/program prioritas SKPD merupakan bagian dari pencapaian misi dan prioritas yang mempunyai keterkaitan dengan isu strategis daerah dengan daya ungkit yang tinggi untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, isu strategis/program prioritas SKPD juga diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai penghubung yang dapat mensinkronkan perencanaan program prioritas dan strategis antara SKPD dengan program prioritas pemerintah daerah. Spesifikasi isu-isu strategis SKPD BPKAD untuk memfasilitasi kelancaran pelaksanaan program kegiatan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai, antara lain :

Tabel. III.9
Skor Kriteria Penentuan Isu Isu Strategis

No	Kriteria*)	Bobot**)
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi/kabupaten/kota	20
2	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	10
3	Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD	20
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25

Tabel III.10
Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria ke-						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							
3	Program Peningkatan Disiplin							





	Aparatur							
4	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS							
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							
6	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							
7	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah							
8	rogram Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa							
9	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi							
10	Program Pengelolaan Barang Daerah							

Tabel III.11
Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis

No.	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata skor	Prioritas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			
4	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS			
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
6	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
7	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			
8	rogram Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			
9	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi			
10	Program Pengelolaan Barang Daerah			

Tabel III.12
Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria ke-						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Adanya Perda Soped (Sisdur, ASB, St. Harga, SOP, SPM)							
2	Kualitas Sumber Daya Aparatur							
3	Komitmen Karyawan							
4	Kemampuan Teknis Fungsional							
5	Standarisasi Beban Kerja							
6	Sarana Prasarana							
7	Peran BPKAD Yang Strategis							





8	Kepercayaan Pimpinan							
9	Koordinasi Dengan Provinsi Dan Pusat							
10	Globalisasi							
11	Persepsi Dalam Membaca Peraturan Dengan Pemeriksa							
12	Informasi Yang Terbuka Dan Perubahan Peraturan Yang Sangat Cepat							
13	Kebebasan Pers							
14	Masyarakat semakin kritis							
15	Kontribusi proyek LNG							
16	Kontribusi BUMD							

Tabel III.13
Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis

No.	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata skor	Prioritas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Adanya Perda Sisdur, ASB, St. Harga, SOP, SPM			
2	Kualitas Sumber Daya Aparatur			
3	Komitmen Karyawan			
4	Kemampuan Teknis Fungsional			
5	Standarisasi Beban Kerja			
6	Sarana Prasarana			
7	Peran BPKAD Yang Strategis			
8	Kepercayaan Pimpinan			
9	Koordinasi Dengan Provinsi Dan Pusat			
10	Globalisasi			
11	Persepsi Dalam Membaca Peraturan Dengan Pemeriksa			
12	Informasi Yang Terbuka Dan Perubahan Peraturan Yang Sangat Cepat			
13	Kebebasan Pers			
14	Masyarakat semakin kritis			
15	Kontribusi proyek LNG			
16	Kontribusi BUMD			

Isu strategis diatas bila dikelompokkan berasal dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang besar pengaruhnya terhadap pelaksanaan tugas, sehingga pada gilirannya juga mempengaruhi hasil dari tujuan organisasi, pengelompokan tersebut sebagai berikut:





→ Kondisi Lingkungan internal

Untuk mengamankan proyeksi rencana pendapatan yang terformulasikan dalam rencana strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset dari tahun 2016-2021 perlu memperhatikan kelemahan yang selama ini dirasakan dan kekuatan internal yang telah teruji kehandalannya selama pencapaian 5 (lima) tahun kebelakang dari tahun 2011-2016.

No	Kelemahan Faktor Internal	No	Kekuatan Faktor Internal
1	Kemampuan Teknis Fungsional	1	Adanya Perda Sopd
2	Standarisasi Beban Kerja	2	Kualitas Sdm Aparatur
3	Sarana Prasarana (termasuk Aplikasi)	3	Komitmen Karyawan

Dari beberapa kelemahan dan kekuatan internal Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang telah dilakukan pembobotan, maka diketahui mana yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian pelaksanaan rencana strategi 5 (lima) tahun ke depan dari mulai tahun 2016-2021.

→ Kondisi Lingkungan Eksternal

Berdasarkan data dasar yang telah diperoleh selama ini terdapat beberapa peluang dan tantangan eksternal yang berpengaruh terhadap pencapaian rencana strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset untuk tahun 2016 - 2021, yaitu:

No	Peluang Eksternal	No	Tantangan Eksternal
1	Peran BPKAD Yang Strategis	1	Perbedaan Persepsi Dalam Membaca Peraturan Dengan Pemeriksa Fungsional
2	Kepercayaan Pimpinan	2	Masyarakat Semakin Kritis
3	Mudah Berkoordinasi Dengan Provinsi Dan Pusat		





4	Kontribusi proyek LNG	3	Informasi Semakin Terbuka Dan Perubahan Peraturan Yang Sangat Cepat
5	Kontribusi BUMD		
6	Pertumbuhan ekonomi Daerah		

→ Rumusan Permasalahan Strategis Yang Dihadapi Masa Kini

Dari beberapa kelemahan dan tantangan yang dihadapi, perlu dirumuskan secara matang dengan harapan bisa berubah jadi potensi yang mendorong pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat peraturan perundang-undangan, transparan dan bertanggung jawab. Supaya ada kesinambungan dalam pencapaian visi, misi dengan nilai yang diharapkan, perlu dilakukan identifikasi mitra kerja, baik internal maupun eksternal, termasuk pula *stakeholders* yang berhubungan langsung dengan implementasi dan rekomendasi yang dihasilkan dalam kebijakan publik, baik dari segi sosial, ekonomi, politik dan stabilitas kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan di Kab. Banggai, terutama yang relevan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban daerah.

IDENTIFIKASI MITRA KERJA DAN *STAKEHOLDERS*

No	Mitra Kerja Internal	Expektasinya yang diharapkan
1	Sumber daya manusia sebagai analis belanja daerah	Peningkatan produktivitas, kapabilitas, Disiplin, aksebilitas, dan sejahtera
2	Tim Analis aturan penarikan pendapatan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Terlindungi dan teraturnya pengelolaan keuangan dan aset daerah
3	Tim analis akuntansi dan anggaran pendapatan, belanja serta pembiayaan	Terpenuhinya tata kelola keuangan daerah yang tidak menjerat para pengelola keuangan daerah
4	Tim Peneliti RKA, DPA, SP2D sebagai sistem yang saling melengkapi	Tidak terjadinya kesalahan yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah
5	SDM BPKAD	Terpenuhinya seluruh kebutuhan penunjang kegiatan, <i>six M+I (Man, Money, Materials), Machines, Methods, Market Information</i>





No	Mitra Kerja Eksternal	Expektasinya yang diharapkan
1	SKPD	Tersusunnya dokumen anggaran pendapatan dan belanja tepat waktu
2	KP Pratama	Terealisasinya semua penerimaan dari Bagi Hasil Pajak
3	KPN	Lancarnya dana transper dari pusat, terutama yang berhubungan dengan dana perimbangan
4	Kas Daerah	Tersedianya <i>cash flow</i> dan dana segar yang diperlukan dalam belanja daerah
5	Kementrian dan Propinsi	Seluruh penerimaan yang Mengakibatkan bertambahnya kekayaan daerah masuk dalam APBD

No	Stakeholders	Expektasinya yang diharapkan
1	DPRD	Dukungan politis dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah
2	Pers	Terpublikasikannya LKPJ, LPPD yang transparan dan bertanggungjawab
3	Perguruan tinggi	Tersedianya naskah akademik dalam penentuan target serta realisasi APBD
4	LSM, LPM, Ormas Pemuda	Partisipatori pemanfaatan dana pembangunan yang terarah dan berkesinambungan
5	Masyarakat	Dirasakannya manfaat pembangunan yang akuntabel

